

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
ESELON II**


Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai dengan Azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  Angka partisipasi angkatan kerja	<p><b>Makna Indikator</b> : Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : <math>\frac{\sum \text{pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%</math></p> <p><b>Makna Indikator</b> : Mengindikasikan besarnya persentase angka partisipasi angkatan kerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : Angka partisipasi peningkatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu dalam mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan kualitas calon tenaga kerja</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : <math>\frac{\sum \text{angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk 15 thn}} \times 100 \%</math></p>	Kabid P4TK	BPS

2.	Hubungan Industrial yang harmonis dan Kondusif	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial	<p><b>Makna Indikator</b> : Melindungi hak-hak Tenaga Kerja yang bekerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : Terlindunginya hak-hak Tenaga Kerja yang sudah bekerja</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : <math>\frac{\sum \text{Total kasus yang diselesaikan}}{\sum \text{Kasus yang dicatat}} \times 100\%</math></p>	Kabid HI	Bidang Teknis HI
3.	Zero Case	Persentase perusahaan yang taat aturan ketenaga kerjaan	<p><b>Makna Indikator</b> : Terbina dan Terawasinya Perusahaan di Kal Sel</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : Zero Accident</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : <math>\frac{\sum \text{Total perusahaan taat aturan ketenagakerjaan}}{\sum \text{Total perusahaan di kalsel}} \times 100\%</math></p>	Kabid Was	Bidang Teknis Was
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigrans	Meningkatnya pendapatan transmigrasn	<p><b>Makna Indikator</b> : Dengan meningkatnya pendapatan transmigrans maka kesejahteraan transmigrans akan meningkat</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : Pendapatan transmigran menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan transmigran</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : <math>\frac{\text{Jumlah pendapatan tahun N} - \text{Jumlah pendapatan tahun N-1}}{\text{Jumlah pendapatan tahun N-1}} \times 100\%</math></p>	Kabid Ketransmigrasian	Bidang Teknis Ketransmigrasian
5.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Disnakertrans	<p><b>Makna Indikator</b> : - Komponen Perencanaan dan Pelaporan pada LKJ SKPD merupakan komponen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksinya</p>		

			<p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : - Pertanggungjawaban kinerja SKPD dapat tergambar dari keberhasilan pencapaian dan pemenuhan nilai nilai komponen perencanaan dan pelaporan pada LKJ SKPD</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Laporan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat</p>		
--	--	--	--	--	--

Banjarmasin, 31 KEPALA Maret 2017  
DINAS,

  
**Ir. ANTONIUS SIMBOLON,M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571202 198503 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN, PRODUKTIFITAS DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**

TUGAS : Melaksanakan Pembinaan dan koordinasi peningkatan dan Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja, kualitas lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta, penyaluran dan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>A. ESSELON III</b>					
1.	Meningkatnya Daya saing Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	<p><b>Makna Indikator :</b> Angkatan kerja yang Bekerja (PyB) = Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> mengindikasikan bahwa dengan Meningkatkan Kompetensi, produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja sehingga jumlah angkatan kerja yang bekerja akan semakin meningkat</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> 100 % dari penduduk - TPT</p>	Kabid Pembinaan Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja ( P4TK )	BPS

<b>B. ESSELON IV</b>					
1.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diterima di pasar kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh sertifikat kompetensi	<p><b>Makna Indikator :</b> Pencari Kerja yang telah di Latih akan dilatih dan disertifikasi untuk lebih lanjut memperoleh sertifikat kompetensi, sehingga keahlian mereka mampu bersaing di pasar kerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Lulusan-lulusan pelatihan keterampilan yang diadakan baik oleh Dinas Tenaga Kerja maupun oleh SKPD lain telah diberikan sertifikasi pelatihan, namun hanya sertifikasi uji keterampilan yang digeluti, sehingga sewaktu mereka mendaftar pekerjaan dianggap masih kurang mampu bersaing dipasar kerja, oleh karena ini sertifikat pelatihan tersebut ditunjang lagi dengan sertifikat uji kompetensi, sehingga diharapkan keahlian mereka benar-benar dapat bersaing dipasar kerja dan handal serta diperhitungkan didunia kerja.</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b></p> $\% \text{ Pencari Kerja yang Memperoleh sertifikat kompetensi} = \frac{\sum \text{Pencari kerja yang memperoleh sertifikat kompetensi}}{\sum \text{Pencari kerja yang ikut pelatihan}}$	Kasi Pelatihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Sertifikasi	Kasi Pelatihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Sertifikasi
		Persentase angkatan kerja yang dapat ditempatkan di Pasar Kerja	<p><b>Makna Indikator :</b> Angkatan Kerja yang telah di Latih dan di sertifikasi hendaknya mudah mencari pekerjaan dan dapat bersaing dipasar kerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dihendaki oleh pasar kerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Banyak angkatan kerja yang kurang dapat diterima dipasar kerja karena kurangnya kompetensi yang dibekali, sehingga kurang mampu bersaing dipasar kerja, sehingga perlu dipantau dan di fasilitasi penempatannya.</p>	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	Kasi Penempatan Tenaga Kerja

			<p><b>Cara Perhitungan :</b></p> $\% \text{ Angkatan kerja yang dapat ditempatkan di Pasar Kerja} = \frac{\sum \text{ Angkatan kerja yang dapat ditempatkan}}{\sum \text{ Pencari kerja yang terdaftar pada aplikasi AK 1 (Pendaftaran IPK Online)}}$		
		Persentase angkatan kerja yang mampu berwirausaha	<p><b>Makna Indikator :</b> Angkatan Kerja yang telah di Latih Kewirausahaan pada Balai Produktifitas dan oleh Dinas Terkait selanjutnya akan dibina untuk dapat berwirausaha sendiri, sehingga mampu meningkatkan produktitas dan pendapatannya</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - Pelatihan kewirausahaan hendaknya tidak hanya sebatas memperoleh pelatihan atau keahlian saja, tetapi hendaknya pelatihan kewirausahaan itu mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas mereka</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b></p> $\% \text{ Angkatan kerja yang mampu berwirausaha} = \frac{\sum \text{ Angkatan kerja yang mampu berwirausaha}}{\sum \text{ Angkatan kerja yang dilatih pada pelatihan Kewirausahaan}}$	Kasi Perluasan Kesempatan Kerja	Kasi Perluasan Kesempatan Kerja

Banjarmasin, 31 Maret 2017  
 KEPALA BIDANG  
 PEMBINAAN PELATIHAN, PRODUKTIFITAS  
 DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA,



Ir. WAHYUDDIN NOOR, MS  
 Pembina Tk. I

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

TUGAS : Melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan syarat-syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian peselisihan industrial

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>A. ESSELON III</b>					
1.	Penguatan kelembagaan hubungan industrial dan jamsostek	<p>Persentase peningkatan perusahaan yang memiliki sarana HI</p> <p>Persentase peningkatan perusahaan yang menerapkan perlindungan Jamsos</p>	<p><b>Makna Indikator :</b> - Terbinanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara perusahaan dan pekerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan akan menciptakan suasana kondusif dalam rangka perlindungan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{realisasi perusahaan memiliki hubungan industrial tahun N} - \text{realisasi perusahaan memiliki hubungan industrial tahun N-1}}{\text{perusahaan memiliki hubungan industrial tahun N-1}} \times 100 \%</math></p> <p><b>Makna Indikator :</b> Bertambahnya perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja dengan cara mendaftarkan ke BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenaga kerjaan</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Dengan bertambahnya perusahaan yang meikutsertakan tenaga kerja nya ke program BPJS sehingga akan meningkatkan perlindungan tenaga kerja</p>	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

		<p>Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama</p>	<p><b>Cara Perhitungan :</b>  Realisasi perusahaan memiliki perlindungan tenaga kerja tahun N  – realisasi perusahaan memiliki perlindungan tenaga kerja N-1  <math display="block">\frac{\text{Realisasi perusahaan memiliki perlindungan tenaga kerja N} - \text{realisasi perusahaan memiliki perlindungan tenaga kerja N-1}}{\text{Realisasi perusahaan memiliki perlindungan tenaga kerja N}} \times 100\%</math></p> <p><b>Makna Indikator :</b> Melindungi hak hak tenaga kerja yang bekerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Terlindunginya hak hak tenaga kerja yang sudah bekerja</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b>  <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Total kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama}}{\Sigma \text{ Kasus yang dicatat}} \times 100 \%</math></p>		
--	--	--	---	--	--



<b>B. ESSELON IV</b>					
1.	Meningkatnya penerapan syarat-syarat kerja dan peningkatan jaminan sosial bagi tenaga kerja	Jumlah Perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	<p><b>Makna Indikator :</b> - Perusahaan pengguna tenaga kerja wajib membentuk LKS Bipartit supaya hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> -LKS Bipartit merupakan sarana yang memfasilitasi kebutuhan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan sehingga segala perselisihan diantara keduanya dapat teratasi dengan baik</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> - Jumlah Perusahaan yang membentuk LKS Bipartit hendaknya semakin meningkat</p>	Kasi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan HI	Kasi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan HI
		Jumlah Perusahaan yang membuat PP/PKB	<p><b>Makna Indikator :</b> - Perusahaan hendaknya dapat membentuk Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada saat mempekerjakan tenaga kerja, sehingga segala aturan-aturan perusahaan dan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dapat terlaksana dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - PP / PKB sangat penting untuk dibentuk diperusahaan, sehingga mengurangi terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> - Jumlah Perusahaan yang membuat PP/PKB hendaknya selalu meningkat</p>	Kasi Peraturan Syarat Kerja	Kasi Peraturan Syarat Kerja
		Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah	<p><b>Makna Indikator :</b> - Sosialisasi penerapan struktur skala upah perlu terus di galakkan supaya hak-hak tenaga kerja tidak diabaikan oleh perusahaan pengguna jasa mereka</p>	Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

		Jumlah perusahaan yang menerapkan program Jamsos	<p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : - Perusahaan wajib memberi upah sesuai dengan UMP dan memperhatikan hak-hak atau jaminan sosial tenaga kerja</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : - Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi struktur skala upah hendaknya semakin meningkat</p> <p><b>Makna Indikator</b> : - Sosialisasi Jamsos perlu terus di galakkan supaya hak-hak tenaga kerja tidak diabaikan oleh perusahaan pengguna jasa mereka</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : - Perusahaan wajib memperhatikan hak-hak atau jaminan sosial tenaga kerja</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : - Jumlah perusahaan yang menerapkan program Jamsos hendaknya semakin meningkat</p>		
--	--	--	--	--	--

Banjarmasin, 31 Maret 2017

KEPALA BIDANG

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

**Ir. H. IDEHAMSYAH, M.AP**

Pembina Tk. 1

NIP. 19650212 199003 1 019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

TUGAS : Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagakerjaan yang meliputi Norma Kerja, Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja serta Penegakan Hukum

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>A. ESSELON III</b>					
1.	Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan ketenaga kerjaan	Persentase penurunan perusahaan yang melanggar aturan ketenaga kerjaan	<p><b>Makna Indikator :</b> - Dilaksanakannya pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan untuk memastikan dilaksakannya norma ketenaga kerjaan / norma kerja dan norma K3 ditempat kerja / lingkungan pekerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - agar terjaminnya hak-hak pekerja baik dari segi Norma Kerja maupun Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b>  <math display="block">\frac{\sum \text{perusahaan yg melanggar th N} - 1 - \sum \text{perusahaan yg melanggar th N}}{\sum \text{perusahaan yg melanggar th N}} \times 100 \%</math></p>	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

**B. ESSELON IV**

1.	Meningkatnya Pembinaan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan	<p><b>Makna Indikator :</b> - Norma kerja wajib diketahui dan dipatuhi oleh perusahaan dan pekerja sehingga terjaminnya kesejahteraan pekerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - Norma kerja seringkali tidak di taati oleh perusahaan, sehingga perusahaan wajib diawasi dan dibina oleh Disnakertrans</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> -</p> $\% \text{ perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan} = \frac{\sum \text{Perusahaan yang melanggar norma kerja}}{\sum \text{seluruh perusahaan di Kal Sel}}$	Kasi Norma kerja	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
		Persentase perusahaan yang melanggar norma K3	<p><b>Makna Indikator :</b> - Norma K3 merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh perusahaan, sehingga tenaga kerja merasa aman dan nyaman dalam lingkungan kerjanya</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Norma K3 seringkali diabaikan oleh perusahaan, sehingga perlu diawasi oleh Disnakertrans</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> -</p> $\% \text{ perusahaan yang melanggar norma K3} = \frac{\sum \text{Perusahaan yang melanggar norma K3}}{\sum \text{seluruh perusahaan di Kal Sel}}$	Kasi Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kasi Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		Persentase penindakan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan	<p><b>Makna Indikator :</b> - Perusahaan yang telah melanggar aturan ketenagakerjaan wajib diberi tindakan karena tidak memperhatikan hak-hak tenaga kerja</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - perlunya tindakan terhadap Peraturan ketenagakerjaan yang telah dilanggar oleh Perusahaan selaku pengguna tenaga kerja</p>	Kasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Kasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

			<b>Cara Perhitungan :</b> $\frac{\Sigma \text{perusahaan yg ditindak BAP}}{\Sigma \text{perusahaan yg melakukan pelanggaran}} \times 100\%$		
--	--	--	---	--	--

Banjarmasin, 31 Maret 2017

KERALA BIDANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,  
**POEGOEH PRJAMBADA, SH MH**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19650119 198603 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIDANG KETRANSMIGRASIAN**

TUGAS : Melaksanakan Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan ketransmigrasian, fasilitasi penyiapan lahan, pembangunan permukiman, perpindahan dan penempatan transmigrasi serta pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi

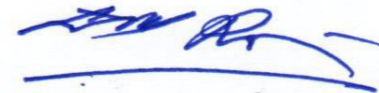
NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>A. ESSELON III</b>					
1.	Peningkatan kualitas dan pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase luas lahan kimtrans yang diusahakan	<p><b>Makna Indikator :</b> Lahan kimtrans merupakan aset utama yang harus diusahakan sebagai modal memperoleh pendapatan</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Meningkatnya luas lahan kimtrans yang diusahakan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Luas lahan kimtrans yang diusahakan}}{\text{Jumlah lahan kimtrans yang ada}} \times 100\%</math></p>	Kabid Ketransmigrasian	Bidang Ketransmigrasian

**B. ESSELON IV**

1.	Meningkatnya jumlah kawasan transmigrasi yang diberdayakan	Jumlah kepala keluarga kimtrans yang meningkat	<b>Makna Indikator :</b> - Kepala keluarga merupakan penggerak utama aktivitas di kimtrans <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - Meningkatnya jumlah kepala keluarga di kimtrans, semakin banyak aktivitas yang dapat dikerjakan <b>Cara Perhitungan :</b> - Jumlah kepala keluarga kimtrans hendaknya semakin meningkat	Kasi Penyiapan lahan dan Bangunan Permukiman	Kasi Penyiapan lahan dan Bangunan Permukiman
		Jumlah kimtrans menjadi Pusat Pertumbuhan Baru	<b>Makna Indikator :</b> - Kimtrans hendaknya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - Masyarakat Transmigrasi yang berada di daerah pinggiran dan terpencil hendaknya dapat membuat daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi supaya tidak tebelakang dan terpencil <b>Cara Perhitungan :</b> - Jumlah kimtrans yang difasilitasi menjadi Pusat Pertumbuhan Baru hendaknya semakin meningkat	Kasi Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	Kasi Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
		Jumlah lahan dan sarana prasarana yang ada di kimtrans	<b>Makna Indikator :</b> - Kimtrans yang berkembang harus diikuti oleh jumlah lahan dan sarana prasarana yang cukup dan memadai <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - Lahan dan sarana prasarana merupakan penunjang dalam meningkatkan jumlah kawasan yang diberdayakan	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

			<b>Cara Perhitungan : -</b> Jumlah lahan dan sarana prasarana yang ada di kimtrans hendaknya semakin meningkat		
--	--	--	---	--	--

Banjarmasin, 31 Maret 2017  
KEPALA BIDANG KETRANSMIGRASIAN



Drs. EDDY ROSYADI, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600724 198203 1 012



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BIDANG SEKRETARIAT**

TUGAS : Mengkoordinir Penyusunan Perencanaan Program dan Pelaporan, Mengelola Urusan Keuangan ,  
 Mengelola Urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Pengelolaan Urusan  
 administrasi Kepegawaian

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>A. ESSELON III</b>					
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	<p>Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD</p> <p>Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD</p>	<p><b>Makna Indikator</b> : - Menggambarkan kinerja yang akan dicapai oleh SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan dengan melihat persentase kenaikan nilai komponen pelaporan LKIP SKPD</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : Untuk mengetahui kenaikan komponen pelaporan pada LKIP SKPD</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : Realisasi nilai pelaporan tahun N dikurang realisasi nilai pelaporan tahun N-1 dibagi realisasi nilai pelaporan tahun N-1</p> <p><b>Makna Indikator</b> : Mendeskripsikan persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : Untuk mengetahui kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD</p>	Sekretariat	Sekretariat

			<p style="text-align: center;">realisasi nilai perencanaan th N - realisasi nilai perencanaan th N-1 Nilai perencanaan th N-1</p> <p><b>Perhitungan Indikator :</b></p>		
2	Pelayanan sarana perasarana dan administrasi perkantoran	<p>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD</p> <p>Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD</p>	<p><b>Makna Indikator :</b> Untuk mendeskripsikan persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui kenaikan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> <math>\frac{\sum \text{sarana dan prasarana yg dipenuhi}}{\sum \text{sarana dan prasarana yg diajukan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Makna Indikator :</b> Mencerminkan pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui kenaikan pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Jumlah permintaan terhadap pemenuhan pengurusan adm kepegawaian PNS Disnakertrans yang dipenuhi dibagi total permintaan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian dikali seratus persen</p>		
3	Peningkatan kualitas SDM SKPD	Persentase ASN SKPD yang memiliki sertifikat keahlian	<p><b>Makna Indikator :</b> ASN SKPD perlu ditingkatkan kualitas nya sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Meningkat nya ASN SKPD yang memiliki sertifikat keahlian sehingga kinerja SOPD dapat meningkat</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> <math>\frac{\sum \text{ASN yg memiliki sertifikat keahlian}}{\text{ASN disnakertrans}} \times 100\%</math></p>		
4	Pelayanan	Persentase aset yang	<b>Makna Indikator :</b> Untuk menggambarkan persentase jumlah asset yang		

	administrasi keuangan	tercatat ( harus 100 % )  Persentase penyerapan anggran SKPD	tercatat <b>Alasan pemilihan indikator</b> : Untuk mengetahui persentase jumlah asset yang tercatat  <b>Cara perhitungan</b> : $\frac{\sum \text{aset yg dicatat}}{\sum \text{total aset}}$  <b>Makna Indikator</b> : Untuk menggambarkan persentase penyerapan anggaran SKPD  <b>Alasan pemilihan indikator</b> : Untuk mengetahui persentase penyerapan anggran SKPD  <b>Cara perhitungan</b> : $\frac{\sum \text{penyerapan anggaran Disnakertrans th N}}{\sum \text{rencana anggaran th N}} \times 100\%$		
--	-----------------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

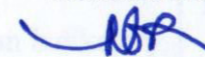
<b>B. ESSELON IV</b>					
1.	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD	<p><b>Makna Indikator :</b> Menggambarkan kinerja yang akan dicapai oleh SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan dengan melihat persentase kenaikan nilai komponen pelaporan LKIP SKPD</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui kenaikan komponen pelaporan pada LKIP SKPD</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Nilai komponen pelaporan LKIP Disnakertrans dari hasil LHE Inspektorat</p>	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Subag Perencanaan dan Pelaporan
		Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD	<p><b>Makna Indikator :</b> Mendiskripsikan persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Nilai komponen perencanaan pada SAKIP Disnakertrans dari hasil LHE Inspektorat</p>	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Subag Perencanaan dan Pelaporan
	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumentasi terkait sarana dan prasarana	<p><b>Makna Indikator :</b> - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran harus diperhatikan</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> - Karena dengan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dengan baik maka terlaksana kegiatan rutin perkantoran</p>	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Subag Umum dan Kepegawaian

			<p><b>Cara Perhitungan :</b> - Jumlah dokumen pencatatan sarana dan prasarana</p>		
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	<p><b>Makna Indikator :</b> Menggambarkan administrasi pelayanan surat menyurat berjalan dengan baik</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> untuk mengetahui jumlah surat menyurat yang tercatat</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Dokumen pencatatan surat menyurat</p>	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Subag Umum dan Kepegawaian
	Menyusun data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian nya dilayani secara tertib	<p><b>Makna Indikator :</b> Menggambarkan administrasi kepegawaian sudah berjalan dengan baik</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah administrasi pegawai secara tertib</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian nya dilayani secara tertib</p>	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Subag Umum dan Kepegawaian
	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	<p><b>Makna Indikator :</b> Menggambarkan ASN yang sudah mengikuti pelatihan dan bersertifikasi</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikasi</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikasi</p>	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Subag Umum dan Kepegawaian
	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	<p><b>Makna Indikator :</b> Menggambarkan jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengetahui jumlah laporan secara</p>	Kasubag Keuangan dan Aset	Subag Keuangan dan Aset

		berkala			
		Jumlah aset yang tercatat	<p><b>Cara Perhitungan</b> : Jumlah dokumen laporan keuangan</p> <p><b>Makna Indikator</b> : Untuk menggambarkan jumlah aset yang tercatat</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator</b> : Untuk mengetahui jumlah aset yang tercatat</p> <p><b>Cara Perhitungan</b> : jumlah aset yang tercatat pada tahun 2017</p>	<p>Kasubag Keuangan dan Aset</p>	<p>Subag Keuangan dan Aset</p>

Banjarmasin, 31 Maret 2017

SEKRETARIS



**ABRIANSYAH ALAM, M.KES**

Pembina Tk. 1

NIP. 19651001 198603 1 013

